

Pelatihan Penyusunan APBDes Partisipatif di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu

Johnly Roycke Pengemanan, Burhan Niode*, Johny R.E. Tampi, Zainul Abidin

Program Studi Ilmu Politik dan Program Studi Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi

*Email: burhanniode@unsrat.ac.id

Abstrak

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam hal penyusunan APBDes. Metode pelatihan yang digunakan adalah ceramah, diskusi, curah pendapat, dan praktik atau simulasi penyusunan APBDes. Pasca pelatihan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman konseptual perencanaan pembangunan perdesaan yang “sangat baik”. Hal ini dibuktikan dengan capaian angka lebih dari 80 persen peserta sangat memahami materi pelatihan. Terhadap kegiatan simulasi penyusunan APBDes, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menyusun rancangan APBDes. Capaian ini membuktikan bahwa luaran yang ditargetkan pada kegiatan ini dapat di realisasikan yakni peserta memahami langkah-langkah penyusunan APBDes dan mampu menyusun APBDes secara partisipatif.

Kata kunci: APBDes partisipatif; pembangunan desa; perangkat desa

Abstract

This training aims to improve the understanding of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the community regarding the preparation of the Village Budget (APBDes). The training methods used were lectures, discussions, brainstorming, and practical or simulation sessions for preparing the APBDes. Post-training results showed that participants had a "very good" conceptual understanding of rural development planning. This was evidenced by the achievement of over 80 percent of participants with a strong understanding of the training material. Evaluation results for the APBDes preparation simulation showed that most participants were able to prepare a draft APBDes. This achievement demonstrates that the targeted outcomes of this activity were realized, namely that participants understood the steps for preparing the APBDes and were able to prepare the APBDes in a participatory manner.

Keywords: participatory APBDes; village development; village officials

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Atas dasar itulah sehingga APBDes bisa dilihat sebagai representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; 1) pendapatan desa, 2) belanja desa; 3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Nurlukman dan Said, 2019).

Dari APBDes tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes tersebut (CéPAD Indonesia, 2004).

Seyogyanya dalam setiap tahapan penganggaran harus melibatkan 3 komponen utama stakeholder, yaitu masyarakat, eksekutif, dan legislatif (Rinusu & Mastuti, 2003). Proses penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya, lebih dimungkinkan tercapainya pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, karena tingginya partisipasi memungkinkan semakin banyaknya preferensi masyarakat desa yang bisa diakomodasi oleh anggaran (Utomo, 2015).

Pembangunan di desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan mengakibatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dimana pendanaan perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam APBDes. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya diadakan penelitian tentang implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam meningkatkan pembangunan di desa (Utomo, 2015). Dengan demikian APBDes merupakan salah satu instrumen utama dalam perencanaan pembangunan perdesaan, sehingga mekanisme penyusunan APBDes penting untuk dipahami, khususnya oleh aparat perdesaan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa bahwa penyusunan APBDes di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan desa dari tahun ke tahun selalu melibatkan pihak eksternal. Pemerintah Desa hanya menerima ketika APBDes tersebut selesai dibuat. Mekanisme seperti memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) Pemerintah Desa harus mengeluarkan dana tambahan untuk pembayaran jasa penyusunannya; (2) Penyusunannya tidak melibatkan masyarakat desa sehingga lemah dari aspek pertanggungjawaban substansial berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa; dan (3) Rentan dengan resistensi masyarakat desa ketika APBDes tersebut diimplementasikan. Berdasarkan pentingnya pemahaman penyusunan APBDes Partisipatif maka perlu dilakukan PKM Pelatihan Penyusunan APBDes Partisipatif Di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu. Target dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah peserta memahami langkah-langkah penyusunan APBDes secara partisipatif, dan peserta mampu menyusun APBDes secara partisipatif.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PKM Pelatihan Penyusunan APBDes Partisipatif Di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu dilaksanakan dengan metode ceramah dan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan Gedung Pertemuan Desa Tombatu pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 2025. Dalam pelaksanaan program ini, metode pelaksanaan yang digunakan didasari dari permasalahan yang ada pada Pemerintah Desa Tombatu yaitu mengatasi permasalahan dalam menyusun APBDes secara partisipatif atau dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa itu sendiri.

Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian materi awal tentang pengertian ataupun konsep tentang perencanaan pembangunan desa, penganggaran pembangunan desa (APBDes), serta praktik penyusunan APBDes secara partisipatif. Agar pengabdian ini dapat mencapai tujuan maka metode yang dipergunakan dalam pengabdian ini sebagai berikut.

(1) Ceramah, diskusi, dan curah pendapat

Metode ini dipergunakan untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Peraturan Desa (PERDes) (**Tabel 1**).

Tabel 1. Materi dan Metode Penguatan Kapasitas Konseptual

Materi	Metode
RPJMDes	ceramah; diskusi; curah pendapat
RKPDDes	ceramah; diskusi; curah pendapat
APBDes	ceramah; diskusi; curah pendapat
PERDes	ceramah; diskusi; curah pendapat

Sumber: Soegiharto dan Ariyanto, 2019, Buku 5

(2) Latihan

Metode ini diberikan kepada peserta agar mereka dapat mempraktikkan cara menyusun APBDes secara partisipatif.

Berdasarkan metode ceramah, diskusi, curah pendapat dan latihan praktik penyusunan APBDes secara partisipatif akan memberikan dampak kepada peserta dalam hal peningkatan keterampilan dalam menyusun APBDes secara partisipatif, sehingga dimungkinkan peserta di kemudian hari dapat mempraktikkan secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pelatihan penyusunan APBDes partisipatif di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu berjumlah 15 orang. Kelimabelas orang peserta ini mewakili unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawatana Desa (BPD), dan masyarakat.

Kegiatan pelatihan ini diawali dengan sambutan Kepala Wilayah Kecamatan Tombatu, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Tombatu. Inti dari sambutan pemerintah tersebut adalah kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan desa serta penyusunan anggaran pembangunan agar keseluruhan aktivitas pembangunan di Kecamatan Tombatu dan Desa Tombatu dapat dilaksanakan dengan berbasis perencanaan. Adas dasat itulah sehingga baik pemerintah kecamatan maupun pemerintahan desa merasa penting akan pelatihan ini, dan merasa bersyukur atas dipilihnya Desa Tombatu sebagai Lokasi pelaksanaan pelatihan.

Materi pelatihan terdiri dari materi penguatan kapasitas konseptual dan simulasi penyusunan APBDes. Materi penguatan kapasitas konseptual terdiri dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMDDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Peraturan Desa (PERDes) diberikan pada hari pertama yaitu tanggal 17 Oktober 2025. Keempat materi ini penting diberikan dalam pelatihan karena materi-materi ini adalah bagian utuh dari perencanaan Pembangunan perdesaan di Indonsia, sehingga dalam setiap pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas perencanaan Pembangunan desa materi-materi ini sudah

seharusnya diberikan. Hari kedua, 18 Oktober 2025, dilakukan kegiatan simulasi penyusunan APBDes.

1. Penguatan Kapasitas Konseptual

Kegiatan pelatihan penyusunan APBDes secara partisipatif diawali dengan pemberian materi tentang RPJMDes. RPJMDes ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa dalam periode 5 tahun. RPJM Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang (Soegiharto dan Ariyanto, 2019, Buku 4).

Memberian materi tentang RPJMDes dapat membantu meningkatkan kapasitas desa, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pembangunan, kualitas hidup masyarakat, kesadaran masyarakat, dan kemampuan desa. Substansi materi yang diberikan antara lain meliputi visi dan misi pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode 5 tahun, analisis situasi pembangunan daerah, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode 5 tahun, strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun, serta indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Tujuan pemberian materi tentang RPJMDes adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Materi kedua adalah RKPDes. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh pemerintah desa untuk periode 1 tahun. Substansi RKPDes antara lain meliputi latar belakang, tujuan, dan sasaran RKPDes, analisis situasi pembangunan desa, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam periode 1 tahun, dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan desa.

Tujuan dari pemberian materi ini antara lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, membantu pemerintah desa untuk memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan yang paling penting dan efektif, membuat pemerintah desa lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa, membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan desa (Soegiharto dan Ariyanto, 2019, Buku 5).

Materi ketiga adalah APBDes. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah sebuah dokumen keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa untuk periode 1 tahun. Substansi APBDes antara lain meliputi sumber-sumber pendapatan desa, penggunaan anggaran desa, sumber-sumber pembiayaan desa, dan rencana penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan pembangunan desa. Tujuan dari pemberian materi APBDes yakni membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas keuangan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Materi terakhir yaitu PERDes. Perdes (Peraturan Desa) adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan desa. Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (Rosidin, 2019).

Substansi Perdes antara lain mencakup nama dan tujuan Perdes, ruang lingkup Perdes atau urusan-urusan yang diatur oleh Perdes, dan prosedur dan proses pengambilan keputusan. Tujuan pemberian materi ini antara lain adalah meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahn desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa.

Keempat materi penguatan kapasitas konseptual diberikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan curah pendapat. Ketiga metode ini diterapkan secara simultan dalam setiap pemberian materi.

2. Simulasi Penyusunan APBDes

Simulasi penyusunan APBDes merupakan inti dari kegiatan pelatihan ini. Sasaran akhir yang ingin diraih melalui pelatihan ini adalah peserta memahami langkah-langkah penyusunan APBDes secara partisipatif, dan peserta mampu menyusun APBDes secara partisipatif. Metode yang digunakan pada simulasi ini adalah latihan atau praktik. Metode ini diberlakukan karena kegiatan ini merupakan simulasi sehingga dianggap perlu adanya latihan atau praktik penyusunan APBDes.

Kegiatan simulasi diawali dengan penjelasan peserta tentang alur penyusunan APBDes (**Gambar 1**). Dilanjutkan dengan penjelasan peserta tentang sumber-sumber pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Guna mempermudah penyusunan APBDes, peserta menggunakan APBDes dari desa lain untuk dijadikan sebagai pembanding, baik berkaitan dengan struktur maupun besaran jumlah ABPDes. Pada akhir kegiatan simulasi, peserta memeperagakan cara mengisi form APBDes. Hasil akhir simulasi adalah rancangan APBDes yang disusun oleh peserta.



Gambar 1. Alur Penyusunan APBDes (Bokiu & Mahmud, 2018)

3. Evaluasi pemahaman peserta

Pasca pemberian materi penguatan kapasitas konseptual dan simulasi penyusunan APBDes dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta berkaitan dengan materi yang diberikan oleh Tim PKM. Instrumen evaluasi yang digunakan adalah daftar pertanyaan dan hasil simulasi. Adapun tolak ukur penilaian adalah tingkat pemahaman peserta dari setiap materi pelatihan dan hasil simulasi penyusunan APBDes (**Tabel 2–5**). Kategori

pemahaman peserta terbagi dalam empat kategori, yakni sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Pertanyaan evaluatif terhadap kesesuaian metode pembelajaran dan pemanfaatan media oleh Tim PKM dalam memberikan materi juga disodorkan kepada peserta.

Tabel 2. Pemahaman Peserta terhadap RPJMD

Pemahaman	Hasil
Sangat baik	83
Baik	9
Cukup baik	8
Kurang baik	-

Tabel 3. Pemahaman Peserta terhadap RKPDes

Pemahaman	Hasil
Sangat baik	80
Baik	12
Cukup baik	8
Kurang baik	-

Tabel 4. Pemahaman Peserta terhadap APBDes

Pemahaman	Hasil
Sangat baik	86
Baik	9
Cukup baik	5
Kurang baik	-

Tabel 5. Pemahaman Peserta terhadap PERDes

Pemahaman	Hasil
Sangat baik	89
Baik	8
Cukup baik	3
Kurang baik	-

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman konseptual peserta terhadap materi-materi berkaitan dengan perencanaan Pembangunan perdesaan seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan PERDes secara umum sangat baik (**Tabel 2–5**). Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian terhadap 15 peserta berkaitan dengan pemahaman materi pendukung simulasi (RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan PERDes) untuk tingkat pemahaman “sangat baik” berada pada angka di atas angka 80 persen. Ini artinya mayoritas peserta pelatihan memahami materi perencanaan pembangunan perdesaan. Peserta yang memiliki pemahaman “baik” berkisar antara 8 – 12 persen. Sedangkan peserta yang memiliki pemahaman cukup baik berkisar antara 3 – 8 persen.

Evaluasi melalui pengamatan langsung pada kegiatan simulasi penyusunan APBDes menunjukkan bahwa mayoritas peserta memahami Langkah-langkah serta substansi materi yang seharusnya termuat dalam form APBDes, sehingga menghasilkan rancangan APBDes Tombatu untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pelatihan penyusunan APBDes partisipatif di Desa Tombatu, Kecamatan Tombatu telah dilaksanakan tanggal 17 Desember s/d 18 Desember 2025 berjalan sesuai dengan perencanaan. Peserta antusias dan sangat apresiatif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim PKM. Evaluasi terhadap pemahaman konseptual peserta berkaitan dengan perencanaan pembangunan perdesaan berada pada kategori “sangat baik”. Hal ini dibuktikan dengan capaian angka lebih dari 80 persen peserta sangat memahami materi pelatihan. Terhadap kegiatan simulasi penyusunan APBDes, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menyusun rancangan APBDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi yang sudah membiayai kegiatan PKM ini dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Nomor: SP DIPA – 139.03.2.693382/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Bokiu, Z., Mahmud, M. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Laporan Pengabdian Masyarakat. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. <https://share.google/zTxVwiJdQIpZgJEjg>
- Centre for Participatory Developmen (CéPAD) Indonesia. (2004). “Advokasi APBDes di Kabupaten Sidoarjo”, tanpa nomor, www.forumdesa.org/makalah/kasimun.html.
- Nurlukman, Adie Dwiyanto, Said, Fadly Fadillah. (2019). Dinamika pengelolaan dana desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan APBDes. JSPG: *Journal of Social Politics and Governance*, 1 (2).
- Rinusu & Mastuti, Sri. (2003). Panduan Praktis Mengontrol APBD, Jakarta: Civic Education and Budget Transperency Advocation (CiBa) & Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Rosidin, Utang. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (1).
- Soegiharto, Saraswati, Ariyanto, Nur. (2019). Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soegiharto, Saraswati, Ariyanto, Nur. (2019). Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.scribd.com/document/573344788/Buku-5-Teknik-Penyusunan-RKP-Desa>
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi kebiakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10 (1), hal. 19-31